

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingginya harapan dan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat semakin kuat dirasakan, dengan semakin meningkatnya tingkat kritis masyarakat di era reformasi ini, mereka menghadapi tantangan dalam bentuk disfungsi dan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Situasi ini seharusnya direspons secara positif oleh pemerintah melalui implementasi perubahan yang terfokus untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan pergeseran peran negara dari konsep "pemerintah" (*government*) menjadi "kepemerintahan" (*governance*), diharapkan dapat memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat. *Good governance* menciptakan suatu kerangka hubungan yang positif, sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (*society*) seperti yang dijelaskan *United Nations Development Programme* dalam (Lembaga Administrasi Negara, 2001).

Terlaksananya *good governance* adalah salah satu prasyarat bagi sistem pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, maka untuk mencapai pemerintahan yang baik harus dijalankannya tata kelola dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa pemerintah dan penyelenggara pembangunan beroperasi secara efisien,

efektif, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntabilitas yang terukur dan sah (Taufeni Taufik, 2013).

Upaya dalam melakukan pengembangan sistem akuntabilitas tersebut sejalan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta memenuhi harapan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan (Peraturan Pemerintah, 2006).

Sebuah kebijakan dibuat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan saat ini telah diubah menjadi Peraturan Presiden Pasal 1 Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis dan menjadi salah satu landasan untuk meningkatkan kinerja lembaga, agar dapat memberikan data mengenai capaian dan kekurangan dari program-program yang telah dijalankan (Gultom, Zakaria, & Sutisna, 2022).

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, mengemukakan bahwa Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Tanggung jawab instansi

pemerintah mencakup evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi program dan kegiatan, dengan tujuan memenuhi arahan dari pemangku kepentingan dan mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan (Prafitasari & Wiludjeng, 2016).

Proses penyampaian informasi tentang pencapaian ini secara teratur dilakukan melalui laporan kinerja, yang juga dikenal sebagai laporan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pelaporan atas tugas dan tanggung jawab tersebut. Laporan tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja instansi dalam melaksanakan program atau kebijakan yang telah direncanakan sehingga akan diketahui apakah program tersebut mampu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan instansi pemerintah (Christy, Setiana, & Cinta, 2017).

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi (Nasir & Gunawan, 2019).

Pemerintah diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas instansi nya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja pemerintah dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses pemerintahan. Hasil dari proses ini adalah rencana strategis instansi pemerintah yang memuat sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya (Ismanudin, 2012).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di dalam modul yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri dari perencanaan kinerja merupakan tahap lebih lanjut dalam pengembangan tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) untuk periode tahunan, untuk memastikan akurasi yang lebih baik. Efektivitas dan efisiensi suatu daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan anggarannya dapat diukur dari hasil akuntabilitas, yang diklasifikasikan sebagai baik (B) hingga sangat memuaskan (AA) jika nilai kinerjanya >60 . Sistem ini menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai hasil akhir (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, 2012).

Organisasi diharapkan mampu menghasilkan laporan kinerja yang menunjukkan akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran serta keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan menggunakan instrumen akuntabilitas berulang yang memerlukan pengawasan dan pelaksanaan yang ahli, serta dukungan dari otoritas pemerintah yang cakap. Kompetensi peralatan yang tidak memadai akan menyebabkan rendahnya tingkat tanggung jawab kinerja, sehingga membatasi kapasitas untuk bersaing dan mencapai efisiensi yang mungkin berguna dalam mempersiapkan masa depan (Aisyah, Tinangon, & Tangkuman, 2020).

Tabel 1. 1 Peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik
5.	CC	> 50 – 60	Cukup
6.	C	> 30 – 50	Kurang
7.	D	> 0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Gambaran kondisi akuntabilitas di tingkat nasional mengacu pada informasi dari Kementerian PAN-RB yang menetapkan penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di daerah. Penilaian ini dibagi dalam tujuh kategori, dimulai dari yang terendah yaitu D, dengan skor 0-30, kemudian kategori C untuk skor 30-50, CC untuk skor 50-60, B untuk skor 60-70, BB untuk skor 70-80, dan A untuk skor 80-90. Kategori tertinggi yaitu AA dengan skor penilaian 90-100. Pada tahun 2021, terdapat progres yang positif, terutama di tingkat pemerintah provinsi yang rata-rata telah mencapai implementasi yang baik atau kategori B dengan skor rata-rata 70,88. Namun, di tingkat kabupaten/kota, kinerja masih dikategorikan cukup atau CC dengan skor rata-rata 61,60 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, 2021).

Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disebabkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten seperti kurangnya komitmen, peraturan yang tidak selaras, kapasitas SDM yang kurang, belum adanya sanksi yang tegas dan belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran. Menurut Hasni Yusrianti (2015), terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), termasuk paradigma yang keliru di kalangan aparatur pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, 2021).

Gambar 1. 1 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi 2022



Provinsi Jawa Barat	SAKIP	RB
Kota Bekasi	B	B
Kota Bogor	BB	BB
Kota Cimahi	B	B
Kota Cirebon	B	B
Kota Depok	B	B
Kota Sukabumi	BB	BB
Kota Tasikmalaya	BB	B

Sumber: YouTube Kementerian PANRB

Menurut hasil rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Reformasi Birokrasi yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bekasi sendiri meraih predikat B sama seperti pada tahun sebelumnya dan masih perlu dinilai dalam hal seberapa baik akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah terutama dalam kemampuan *good governance* di lembaga pemerintah Kota Bekasi termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan peningkatan, salah satunya di Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi (Satukan Negeri, 2020).

Dasar hukum terbentuknya Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi (Pemerintah Daerah, 2021).

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kota Bekasi. Perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berpengetahuan (Pemerintah Daerah, 2022).

Sedangkan dalam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governane*) penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan mudah diakses dan bisa memberikan perlindungan kepentingan negara dan menjamin hak-hak keperdataan

rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, agar arsip bisa menjadi bukti akuntabilitas (Pemerintah Daerah, 2022).

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam mendukung pencapaian Misi yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, melalui pelaksanaan misi Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, pengelolaan dan layanan pemerintah, adapun beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dengan target dan realisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bekasi tersebut yaitu

Tabel 1. 2 Capaian Kinerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kearsipan Pemerinatahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	69.41	68,39	83,29
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	58.84	60,54	62,59
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.56	82,8	81,17
		Nilai AKIP	79.17	79,88	67,91

Sumber : disarpusda.bekasikota.go.id

Melihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh oleh Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 dimana indikator sasaran pertama yaitu “Indeks Pengawasan Kearsipan” memperoleh nilai sebesar 83,29, indikator sasaran kedua yaitu ” Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi” mencapai nilai sebesar 62,59, indikator sasaran ketiga yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” yang mencapai nilai sebesar 81,17 serta indikator yang keempat yaitu “Nilai AKIP” mencapai 67,91.

Berdasarkan nilai capaian yang diperoleh Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada beberapa indikator mengalami peningkatan kecuali pada indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengalami penurunan penilaian dikarenakan masih adanya permasalahan seperti sumber daya pengelola perpustakaan dan kearsipan yang masih kurang dan pegawai belum memiliki kompetensi di bidang perpustakaan dan kearsipan, pendanaan perpustakaan dan kearsipan masih mengandalkan APBD Kota Bekasi, belum terbentuknya budaya baca serta kesadaran tertib arsip di masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan arsip belum optimal, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan dan kearsipan masih terbatas (Disarpusda, 2023).

Menganalisis permasalahan di atas, yaitu akuntabilitas kinerja yang belum sepenuhnya tercapai serta untuk memastikan bahwa *Good Governance* dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan kinerja unggul, oleh karena itu penulis tertarik bermuara pada karakteristik yang ingin dipelajari dan untuk diteliti lebih lanjut

terkait bagaimana cara aparat mengimplementasikan *good governance* untuk meningkatkan kinerja instansi serta mengevaluasi permasalahan yang terjadi, maka penulis rumuskan dengan judul “Implementasi *Good governance* dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi *Good Governance* di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi?
- 2) Bagaimana implementasi *Good Governance* dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi?
- 3) Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang akuntabilitas kinerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Menganalisis suatu penerapan pada *Good governance* di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.
2. Menganalisis implementasi *Good governance* dalam Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang kinerja instansi pemerintah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian tentang Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah banyak dilakukan, namun peneliti belum menemukan penelitian tentang Implementasi *Good governance* dalam Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, karena penelitian ini berfokus pada Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good governance* maka dari itu peneliti membutuhkan beberapa referensi yang berkaitan dengan hal tersebut berupa jurnal, skripsi dan buku.

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Enditya L Raharja, Lukman M, A Faroby Falatehan tahun 2018 dengan judul Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. Permasalahan yang saat ini melanda pemerintah adalah pegawai pemerintah percaya bahwa ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai misi dan fungsi inti mereka hanya bergantung pada kemampuan lembaga tersebut untuk memenuhi anggaran yang dialokasikan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk analisis terhadap kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dan merumuskan strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Teori yang digunakan dalam penelelitian ini adalah Thomas L. Saty menggunakan persepsi manusia yang dianggap sebagai pakar atau ahli sebagai input utama dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan akuntabilitas

kinerja Pemerintah Kota Bogor. Metode penelitian melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, serta Inspektorat dengan menggunakan data primer melalui observasi dan kuesioner, serta data sekunder dari berbagai sumber informasi, termasuk Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan rencana pembangunan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan tujuh faktor kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor, termasuk harmonisasi dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil, dan pembuatan indikator kinerja individual. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja meliputi memperkuat komitmen, menerapkan anggaran berbasis kinerja, mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Jadi relevansi penelitian ini adalah terdapat pada komponen-komponen utama di dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja tugas pokok instansi pemerintah.

Rujukan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Taufeni Taufik tahun 2013 dengan judul “Peran Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”, terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan. Oleh karena itu perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem akuntabilitas yang

memadai, jelas, terukur dan sah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja mereka, serta bagaimana pemerintah memantau dan menilai secara tahunan.

Teori yang digunakan dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 18 No. 6 Tahun 2007. Pasal ini menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja secara umum atas penerapan dan pencapaian SPM di pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan dukungan Tim Pembina Penyusunan SPM.

Menurut Kementerian PAN & RB (2012), hasil evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada tahun 2011 masih kurang menggembirakan. Di sisi lain, kekurangan berarti sistem dan struktur manajemen kinerja tidak dapat diandalkan dan memerlukan banyak perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan dengan membantu memberikan saran, masukan, atau rekomendasi untuk penyempurnaan program yang dipantau di masa yang akan datang. Relevansi dari penelitian ini pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah baik yang salah satunya menyatakan harus ada komitmen dari

pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi setujuan dengan tujuan dan program agar akuntabel.

Jurnal rujukan ke tiga ditulis oleh Muhamad Imam Syairozi, Akhlis Priya Pambudy, Mohammad Yaskun, dengan judul ‘’Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah’’ Tahun 2021. Peraturan Pemerintah No.56/2005 mendesak pemerintah daerah untuk mengadopsi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Berbagai informasi diberikan oleh pemerintah daerah pada dasarnya adalah proses akuntansi keuangan daerah sistem sedang diatur dan disajikan sesuai dengan pemerintah standar akuntansi. Oleh karena itu, tujuan SIKD adalah untuk membantu kepala daerah pemerintah untuk mengelola dan memikul tanggung jawab keuangan daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tata kelola yang baik.

Metode penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif maupun kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105/2000, sistem akuntansi keuangan daerah initelah didukung dengan adanya suatu standar akuntansi pemerintahan, yang akan menjadi payung bagi pemerintah daerah di dalam penyusunan laporan keuangannya secara lebih transparan, akuntabel dan dapat memiliki kualitas daya banding (*comparability*) untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk membantu daerah dalam mengelola keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas. Namun, saat ini implementasinya masih rendah. Harapannya sistem ini akan mendorong tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Relevansi Penelitian ini yaitu terdapat pada teori konsep *good governance* yang menggunakan *United Nations Development Programme* mengemukakan 9 karakteristik Partisipasi, Taat Hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi pada Kesepakatan, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, Visi Strategik.

Jurnal rekomendasi ke empat ditulis oleh Rifaid & Nomi (2022) dengan judul “Mengukur Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram”. Pengukuran kinerja, disebut juga *benchmarking* kinerja, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yang baik bertumpu pada tiga pilar utama: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Ketiga pilar tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan berbagai rencana program, kegiatan, keputusan, sikap dan tindakan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perangkat daerah khususnya bagian organisasi di Sekretariat Daerah Kota Mataram, karena jelas

memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembentukan kebijakan publik sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)*. Penelitian ini menggunakan teori Mulyadi (2001) Pengukuran kinerja adalah proses mengevaluasi kinerja operasional suatu organisasi, serta unit dan anggotanya secara berkala dengan menggunakan tujuan, tolok ukur, dan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif, dan metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2018 dinilai sukses. Namun untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini, dibutuhkan lebih banyak kolaborasi dalam perencanaan anggaran dan program untuk memberikan peningkatan kompetensi SDM aparatur dan peningkatan koordinasi antar pihak terkait dan satuan kerja guna mencapai hasil dan pemanfaatan sumber daya yang sebaik-baiknya dengan tetap berpegang pada prinsip *good governance* dalam rangka pelaksanaannya. pemerintahan mandiri teritorial.

Jadi relevansi penelitian ini terdapat pada laporan akuntabilitas kinerja pemerintah harus dipublikasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa menilai secara objektif hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, karena akuntabilitas kinerja merupakan wujud dari keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang dan dituntut untuk

memberikan informasi seterang-terangnya kepada masyarakat sebagai objek dari penerima pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Jurnal rekomendasi ke lima ditulis oleh Mahyuddin & Sahri (2022) dengan judul Implementasi “ Prinsip–Prinsip *Good governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Pemerinntah Daerah”. Implementasi prinsip-prinsip *Good governance* salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang akuntabel, menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Saat ini, pelayanan publik masih memiliki beberapa kelemahan, seperti kurang responsif, kurang informatif, kurang aksesibel, kurang koordinasi, kurang birokratis, kurang mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat, serta kurang efisien (Gustianra dan Serly, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Good governance* dan dampaknya terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bahwa kinerja aparatur pemerintah (*performance*) mencerminkan sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan berhasil dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data, seperti kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor, termasuk akuntabilitas, keterbukaan, penerapan hukum, daya tanggap, keadilan atau kesetaraan, dan hukum, harus dipertimbangkan ketika menerapkan prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun faktor seperti akuntabilitas, keterbukaan, penerapan hukum, daya tanggap, keadilan, dan hukum, serta kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, dan tingkat tanggung jawab aparat pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan manfaat, penerapan prinsip *Good governance* memberikan dampak positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Jadi relevansi penelitian ini terdapat pada prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi faktor pendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja aparaturannya.

Jurnal ke enam ditulis oleh Andri Zulfiandri (2017) dengan judul “Faktor-Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (Studi empiris pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten). Media menggunakan laporan kinerja, yang menguraikan secara ringkas dan menyeluruh capaian mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat sebagaimana tertuang dalam dokumen.

Mengkaji transparansi tujuan anggaran, kompetensi aparatur, pelaksanaan akuntansi keuangan daerah, dan pengendalian kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori LAN (2003). Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan landasan pelaporan keuangan pemerintah, yang didasarkan pada akses masyarakat terhadap informasi dan penjelasan tentang pengumpulan dan penggunaan sumber daya. Penelitian ini

mengevaluasi model penelitian dengan pendekatan SEM (*structural Equation Model*) berbasis PLS (*Partial Least Square*) yang memerlukan dua tahap pengujian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah variabel, termasuk keberhasilan operasional, kejelasan target anggaran, pelaksanaan akuntansi keuangan daerah, dan pengendalian kualitas pelaporan keuangan, mempengaruhi akuntabilitas penyelenggara negara atas pekerjaannya. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sertakan faktor komitmen manajemen, gaya kepemimpinan, dan organisasi dalam penelitian selanjutnya. Jadi relevansi penelitian ini terdapat di anggaran pemerintah daerah dan perjanjian kinerja yang akuntabel merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,

Jurnal rekomendasi ke tujuh ditulis oleh Kadratin, dkk (2017) dengan judul “Strategi Peningkatan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016”. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang masih dilakukan secara manual terutama dalam hal pelaporan, pemantauan dan evaluasi kinerja. Mengukur kinerja menjadi sulit karena pengumpulan data lambat dan tidak tepat waktu dalam kondisi seperti ini.

Selain itu, karena sistem yang masih manual, masyarakat dan pemangku kepentingan tidak bisa melihat langsung kinerja Pemkab Magelang. Hal ini berdampak pada transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metodologi yang dapat membantu Departemen Pekerjaan Sosial dan Transmigrasi meningkatkan kinerjanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Konsep *Good Governance* menurut *United Nations Development Programme* yang digunakan dalam penelitian ini, yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai tahap evaluasi suatu proses yang melibatkan pelaksanaan kinerja organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan sejumlah informan yang mengetahui dan terlibat dalam proses akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi SO Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi adalah dengan menciptakan kondisi yang mendukung dengan melakukan berbagai upaya, seperti menggunakan dokumentasi perencanaan dan pelaksanaan SKPD untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan, memaksimalkan potensi SDM yang telah tersedia, meningkatkan kinerja organisasi melalui pembinaan dan pelatihan, memperkuat pengawasan internal, dan menjalin hubungan yang efisien dengan

mitra luar SKPD. Selain itu, rencana ini memerlukan penerapan aplikasi e-SAKIP guna meningkatkan tanggung jawab kinerja SKPD.

Relevansi jurnal dengan penelitian ini adalah pada upaya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia, melakukan pembinaan dan pelatihan meningkatkan kinerja organisasi, dan menjalin hubungan yang efisien dengan mitra luar.

Jurnal rekomendasi ke delapan ditulis oleh Darmawaty, Murtir Jeddawi, Sampara Lukman (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat”. Akuntabilitas publik secara umum dimaksudkan untuk memberikan suatu informasi atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) Di Kota Depok saat ini diharapkan mampu menjalankan tugas-tugas birokrasi dengan cara yang jelas dan akuntabel untuk mengetahui kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengetahui dan menganalisis proses terjadinya melaksanakan kebijakan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, Bahwa : “*policy*

implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Proses Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Pemerintah belum mencapai tujuan target yang telah ditentukan karena pemahaman yang kurang tepat terhadap substansi pokoknya tugas dan fungsi tindakan, sasaran, tujuan program kebijakan pelaksana, kurangnya alokasi anggaran, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, tidak tersedianya sarana prasarana pendukung, tidak efektif komunikasi, koordinasi, dukungan otoritas yang terbatas dan disiplin yang rendah. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan target dan realisasi adalah dengan memberikan intervensi dan dukungan otoritas, meningkatkan sumber daya untuk membiayai program, peningkatan mutu dan mutu sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelaksana kebijakan dalam mewujudkan yang unggul melayani.

Relevansi jurnal dengan penelitian ini terdapat pada penegasan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut

Jurnal rekomendasi ke sembilan ditulis oleh Clarita Rosa, Saifullah Zakaria, Jajang Sutisna (2022) dengan judul “Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan SAKIP Sebagai Upaya Penerapan *Good governance* Pada Direktorat Jenderal Kerja sama Multilateral Kemeenterian Luar Negeri Republik Indonesia”. Nilai Akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Kerja Sama dengan kategori BB (sangat baik). Tetapi berbagai faktor yang masih menjadi kendala, dikhawatirkan kedepannya akan menciptakan sistem kerja yang tidak sehat. Sistem kerja yang tidak sehat tentunya akan menghadirkan permasalahan baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama.

Maka dari itu, diperlukan suatu upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengawasan pemerintahan dalam pelaksanaan akuntabilitas sebagai upaya penerapan *Good governance* pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, agar nantinya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya penerapan *Good governance* dapat terlaksana dengan lebih baik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purpose sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih terkendala dengan tingginya tingkat turnover pegawai. Ada sebuah jumlah sumber daya manusia yang terbatas, dan karyawan yang kompleks. Perlu upaya serius untuk mengatasinya dengan berbagai kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan memiliki mengawasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Direktorat Jenderal Multilateral Kerjasama Republik Indonesia. Namun pengawasannya belum berjalan maksimal akibat hal tersebut faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Relevansi jurnal dengan penelitian ini terdapat pada bagaimana cara mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia agar dapat bersaing di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Jurnal rekomendasi ke sepuluh ditulis oleh Dendy Syaiful Akbar (2016) dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good governance* ” (Studi Pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya). DPRD Kabupaten Tasikmalaya masih belum berfungsi dengan baik dalam mengawasi tanggung jawab dan fungsi BKPLD Kabupaten Tasikmalaya, maupun proses penganggaran keuangan BKPLD. Itulah beberapa persoalan penerapan sistem akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang sehat dan tepat yang masih mendera BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Tidak transparannya proses akuntabilitas kegiatan keuangan, evaluasi kinerja yang dilakukan di luar prosedur, dan partisipasi

masyarakat menjadi permasalahan tambahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai aspek penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam penelitian ini, teknik deskriptif analitis berbasis survei digunakan sebagai metodologi penelitian. Penerapan *good governance* dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi topik utama penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan BKPLD (Kabupaten Tasikmalaya) menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinilai sangat baik. Evaluasi ini diukur dengan menggunakan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Perencanaan (akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, daya tanggap, kesetaraan, keterlibatan, kepatuhan hukum, dan visi strategis). Relevansi jurnal dengan penelitian ini adalah dimana mengembangkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman ke arah pemikiran atau tindakan pemerintahan yang baik.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas pengaruh penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap instansi pemerintah seperti penelitian (Andri Zulfiandri, 2017; Dendy Syaiful Akbar, 2016). Namun, ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kinerja aparatur pemerintah (Agus Sunarmo, Rini Widianingsih Umi Pratiwi, Taufik Hidayat,

2018; Muhamad Imam Syairozi, Akhlis Priya Pambudy, Mohammad Yaskun , 2021; Mahyuddin, Sahri, 2022) selain itu membahas SAKIP yang hanya berfokus pada Peran Monitoring, Evaluasi, dan pengawasan (Taufeni Taufik, 2013; Clarita Rosa Riflyani Gultom, Saifullah Zakaria, Jajang Sutisna, 2022), dan ada juga penelitian terdahulu yang membahas kebijakan SAKIP (Darmawaty, Murtir Jeddawi, Sampara Lukman, 2020; Hasni Yusrianti, Rika Henda Safitri, 2015). Penelitian terdahulu juga membahas terkait focus penerapan strategi peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Kadratin, Y. I., Sugiri, S., & Mahsun, M, 2016; Enditya Luhur Raharja, Lukman M Baga, A Faroby Falatehan, 2018) dan mengukur beberapa hal terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Rifaida, Nomi Wahyu, 2022).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan masing–masing fokus implmentasi kebijakan SAKIP yang dituju pada instansi pemerintah, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana pemerintah mengimplementasikan *good governance* termasuk prinsip-prinsipnya ke dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara aspek keseluruhan, apakah kebijakan sudah diimplementasikan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu pondasi untuk memperbaiki kinerja instansi dan harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah.

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang Studi Akuntabilitas Publik dalam memberikan suatu informasi baik keberhasilan maupun kegagalan dari suatu program yang dilaksanakan dan sudah terlaksanakan di masing – masing daerah.

1.4.2. Signifikansi Praktis

- 1) Bagi Pihak Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik pusat maupun daerah pemerintahan dalam menentukan kebijakan maupun regulasi serta konsep dan sebagai acuan perbaikan dalam akuntabilitas kinerja sebagai upaya meningkatkan peranan dan eksistensi para aparat pemerintah sesuai prinsip *Good governance* .
- 2) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang implementasi *good governance* dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta dapat menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan terhadap kenyataan di lapangan.
- 3) Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi serta wawasan mengenai Implementasi *good governance* dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian mahasiswa dimasa yang akan data

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta tata cara penyusunan penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, diuraikan teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Implementasi *Good governance* Dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah. Teori ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan, teori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, teori *Good governance* , teori Persepsi *Stakeholder*.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, diuraikan tentang paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian yang akan digunakan, teknik perolehan informan, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, agenda penelitian dan keterbatasan yang mungkin dimiliki peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang temuan-temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “ Implementasi *Good governance* dalam Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi “.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari peneliti dan saran yang dapat disampaikan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

Dalam hal ini dipaparkan daftar yang berisi informasi mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian mengenai judul buku, jurnal, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya.